

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU PRAKERJA DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Lia Apriani¹, Sutarjo. S.H., MH²

Fakultas Ilmu Sosial dan Bisnis, Program Studi Ilmu Politik, Universitas Wanita Internasional

Email: Liaprianilly@gmail.com¹, sutarjo@iwu.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Kartu Prakerja tahun 2023–2024 di Kabupaten Bandung Barat dengan menggunakan teori Edwards III yang mencakup empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Kartu Prakerja di Kabupaten Bandung Barat sebagian besar masih didominasi oleh Manajemen Pelaksana Program (PMO) di tingkat pusat. Peran Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) KBB relatif minim, baik dalam aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, maupun struktur birokrasi. Hal ini berdampak pada ketiadaan sosialisasi, pendampingan, dan pengelolaan data penerima manfaat. Akibatnya, masyarakat lebih banyak memperoleh informasi dari media sosial atau pihak ketiga. Penelitian juga menemukan praktik perjokian dalam proses pendaftaran, di mana peserta menggunakan jasa pihak lain dengan imbalan sebagian insentif, yang mencerminkan lemahnya pengawasan serta pendampingan daerah. Hambatan lain meliputi keterbatasan literasi digital, minimnya akses terhadap perangkat teknologi, serta kurangnya fleksibilitas sistem pelatihan. Dari sisi struktur birokrasi, lemahnya koordinasi pusat dan daerah menjadi faktor utama penghambat efektivitas implementasi. Temuan ini menegaskan perlunya perbaikan tata kelola implementasi, khususnya peningkatan koordinasi antarlevel pemerintahan, penguatan peran Disnaker, serta penyediaan pendampingan bagi peserta agar program Kartu Prakerja lebih tepat sasaran dan mampu meningkatkan kompetensi kerja masyarakat Kabupaten Bandung Barat.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kartu Prakerja, Kabupaten Bandung Barat

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Pre-Employment Card (Kartu Prakerja) policy in 2023–2024 in West Bandung Regency using Edwards III's policy implementation theory, which covers four main variables: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research applies a descriptive qualitative method with data collected through interviews, field observations, and documentation.

The findings indicate that the implementation of the Pre-Employment Card program in West Bandung Regency is still largely dominated by the central Program Management Office (PMO). The role of the West Bandung Manpower Office (Disnaker) remains limited in terms of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This results in the absence of socialization, assistance, and management of beneficiary data. Consequently, the community tends to obtain information mainly from social media or third parties rather than directly from local government. The study also reveals the prevalence of "jockey" practices during registration, where participants use third-party services to create accounts in exchange for part of their incentives, reflecting weak supervision and local-level support. Other challenges include limited digital literacy, lack of access to technological devices, and the inflexibility of the training system. From a bureaucratic perspective, weak coordination between the central and local governments is identified as a major factor hindering effective implementation. These findings underscore the need for improved governance, particularly by enhancing coordination across government levels, strengthening the role of the Manpower Office, and providing greater support for participants so that the Pre-Employment Card program can be more targeted and effective in improving the work competencies of the people of West Bandung Regency.

Keywords: Policy Implementation, Pre-Employment Card, West Bandung Regency

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi berbagai tantangan dalam proses pembangunan perekonomiannya, salah satu hambatan terbesarnya adalah masalah pengangguran dan ketimpangan sosial di dalam masyarakat. Indonesia sendiri menjadi negara ke-2 dengan tingkat pengangguran tertinggi diantara negara *Asean* lainnya berdasarkan data dari Databoks pada tahun 2023. Oleh karena itu, masalah pengangguran harus segera diatasi karena sangat berdampak pada stabilitas sosial dan ekonomi negara, dikarenakan pengangguran dapat menyebabkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang tinggi sehingga dapat menghambat pertumbuhan perekonomian negara.

Pemerintah dalam upaya untuk mengatasi masalah pengangguran menciptakan Program Kartu Prakerja yang pertama kali diluncurkan pada tanggal 11 April 2020 sampai pada Tahun 2024 sudah berjalan 72 gelombang pendaftaran Kartu Prakerja. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat agar dapat meningkatkan keterampilan kerja, produktivitas dan kemampuan kewirausahaan. Sehingga masyarakat mampu meningkatkan taraf hidupnya melalui program Kartu Prakerja yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Kartu Prakerja ialah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk para pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Dalam program tersebut pemerintah berupaya meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) agar dapat mengatasi masalah pengangguran yang dapat berimplikasi pada kemiskinan.

Dalam pelaksanaannya program ini berjalan secara pusat melalui Manajemen Pelaksana (PMO) Kartu Prakerja melalui laman Instagram resmi kartu prakerja [@prakerja.go.id](https://www.instagram.com/prakerja.go.id). Namun, dalam Peraturan Presiden No. 36 tahun 2020 pasal 28, Pemerintah daerah berperan memberikan dukungan dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja dalam bentuk sosialisasi, penyediaan data lembaga pelatihan yang berkualitas di daerah dan fasilitas pendaftaran peserta dari pemilihan jenis pelatihan pada Program Kartu Prakerja. Seperti yang disampaikan dalam acara sosialisasi kebijakan Program Kartu Prakerja (wilayah Jabar 1) di Bekasi, Jumat (04/09/2020) sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono menyampaikan bahwasannya Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi di Pemerintahan Daerah dapat membantu dalam mensukseskan Program Kartu Prakerja dengan melakukan sosialisasi program tersebut kepada seluruh pemangku kepentingan yang bersangkutan di tiap-tiap daerah dengan memberikan fasilitas bagi masyarakat yang kesulitan infrastruktur, sarana digital, terutama bagi penyandang disabilitas agar mereka dapat mengikuti Program Kartu Prakerja dan dapat menyinergikan Program Kartu Prakerja dengan Program Pemda lainnya. (Hartanto, 2024) Menyatakan semakin berkualitasnya SDM suatu negara maka negara tersebut akan semakin maju. Oleh karena itu, pemerintah berfokus untuk meningkatkan kualitas SDM dengan pelatihan yang sudah disediakan dalam Kartu Prakerja agar tenaga kerja memiliki kemampuan yang relevan dengan kebutuhan pasar. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Abdurrohman bahwa: Kartu Prakerja adalah salah satu kartu yang digalangkan oleh Presiden Jokowi dalam rangka program pembinaan Warga Negara Indonesia dan pelatihan kerja bagi yang belum memiliki keterampilan. Dalam penggunaan Kartu Prakerja ini diyakini bahwa dapat menanggulangi kemiskinan dan dinilai lebih efektif dalam menanggulangi pengangguran di Indonesia.

Kartu Prakerja sebagai program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan berfokus pada sisi penawaran di pasar kerja dengan meningkatkan keterampilan yang sesuai dengan permintaan di pasar tenaga kerja dan bukan menyediakan lowongan pekerjaan. Oleh karena itu, kartu prakerja ingin membekali para pelaku usaha atau pekerja agar dapat menciptakan lowongan pekerjaan nya sendiri

sebagaimana disampaikan oleh Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja dalam wawancaranya dengan GPR TV. Hal ini akan menekan angka pengangguran di Indonesia.

Sebagai perbandingan, kondisi ketenagakerjaan nasional menunjukkan bahwa TPT Indonesia pada Agustus 2023 berada di angka 5,32 %, dengan jumlah penganggur sekitar 7,86 juta orang. Data ini menunjukkan adanya penurunan sebesar 0,54 persen poin dibanding Agustus 2022. Selanjutnya, kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Barat, yang mencakup Kabupaten Bandung Barat, berada sedikit di atas rata-rata nasional, dengan TPT sebesar 6,74 % per Agustus 2023. Sejalan dengan fenomena di tingkat provinsi, kondisi di Kabupaten Bandung Barat menjadi salah satu alasan utama pentingnya penelitian ini. Berdasarkan data BPS Kabupaten Bandung Barat,

Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Barat menjadi salah satu alasan utama mengapa penelitian ini penting dilakukan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung Barat pada Agustus 2023, tingkat pengangguran terbuka (TPT) tercatat sebesar 8,11%. Angka ini memang mengalami penurunan sebesar 1,52 persen poin dibandingkan Agustus 2022 yang mencapai 9,63%, namun masih relatif tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata provinsi maupun nasional. Dari total angkatan kerja sekitar 1,86 juta jiwa, jumlah pengangguran di KBB pada 2023 tercatat mencapai 150.846 jiwa. Namun, dengan menurunnya tingkat pengangguran terbuka menjadi 6.70 %, persentase penduduk miskin disana tetap tinggi mencapai 10,52%. Hal ini membuktikan bahwa dengan berkurangnya pengangguran tidak menjamin kesejahteraan hidup meningkat.

Data ini menunjukkan bahwa meskipun tren pengangguran menurun, kebutuhan akan program peningkatan keterampilan dan penyaluran tenaga kerja masih sangat mendesak di Kabupaten Bandung Barat. Angka TPT yang cukup tinggi di KBB tidak hanya menggambarkan adanya keterbatasan lapangan pekerjaan, tetapi juga mengindikasikan adanya kesenjangan keterampilan (*skills gap*) antara pencari kerja dan kebutuhan pasar tenaga kerja. Banyak masyarakat yang tidak memiliki kompetensi yang sesuai dengan perkembangan industri modern, seperti teknologi digital, kewirausahaan, hingga pemasaran online. Dalam fenomena ini, program Kartu Prakerja hadir sebagai solusi yang dapat membantu mengurangi *skills gap* tenaga kerja melalui pemberian pelatihan berbasis kebutuhan industri. Fenomena diatas dapat disebabkan karena berbagai situasi yang terjadi di masyarakat seperti kurangnya pendidikan, pelatihan dan kurangnya sosialisasi dari pemerintahan setempat. Peningkatan Angkatan kerja jika tidak dibarengi oleh ilmu dan pelatihan kerja yang memadai, akan menyebabkan ketimpangan tenaga kerja. Oleh karena itu, banyak yang bekerja serabutan sehingga tidak dapat menjamin kebutuhan dan kesejahteraan para pekerja dalam jangka panjang. Berdasarkan data dari BPS Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Barat Agustus 2023, kebanyakan pekerja di Kabupaten Bandung Barat bekerja di sektor jasa sebesar 49,47% sebanyak 92.296 orang dan bekerja pada kegiatan informal sebanyak 515.696 orang (59,26 %), dengan banyaknya penduduk bekerja tamatan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD) Sebesar 40,87 %. Sehingga diperlukannya kesadaran masyarakat dan kontribusi dari pemerintah untuk dapat mengatasi permasalahan diatas.

Berdasarkan fenomena diatas, urgensi penelitian mengenai implementasi Kartu Prakerja di Kabupaten Bandung Barat menjadi sangat relevan. *Pertama*, penelitian ini penting untuk menilai sejauh mana program ini sudah menjangkau masyarakat Kabupaten Bandung Barat, khususnya kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan masyarakat yang tinggal di daerah dengan keterbatasan infrastruktur digital. *Kedua*, penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi hambatan yang dihadapi baik oleh peserta maupun oleh pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program. *Ketiga*,

penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat, apakah program ini benar-benar mampu meningkatkan keterampilan, membuka akses pekerjaan, atau bahkan mendorong munculnya wirausaha baru di daerah. *Keempat*, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam menyinergikan program Kartu Prakerja dengan program ketenagakerjaan lainnya di Kabupaten Bandung Barat, sehingga dampaknya terhadap penurunan pengangguran bisa lebih signifikan.

1. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah peneliti telah merumuskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

- 1) Bagaimana proses Implementasi Kebijakan Kartu Prakerja pada tahun 2023- 2024 di Kabupaten Bandung Barat ?
- 2) Bagaimana kendala atau hambatan yang dihadapi dalam proses implementasian Kartu Prakerja di Kabupaten Bandung Barat ?
- 3) Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam implementasi Kebijakan Kartu Prakerja di Kabupaten Bandung Barat ?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan untuk :

- 1) Mengetahu bagaimana proses pengimplementasiaan Kebijakan Kartu Prakerja di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2023 - 2024 ?
- 2) Mengetahui apakah terdapat hambatan atau tantangan dalam menjalankan Kebijakan Kartu Prakerja di kabupaten Bandung Barat
- 3) Mengetahui apa upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam implementasi Kebijakan Kartu Prakerja di Kabupaten Bandung Barat

METODE DAN PENDEKATAN PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Kualitatif. Menurut Sugiyono (2013:1) Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti suatu keadaan objek alamiah dengan berlandaskan filsafat *postpositivisme*. . Penelitian menggunakan objek alamiah dilakukan tanpa manipulasi oleh peneliti dengan instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Analisis data kualitatif bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta dilapangan yang kemudian disimpulkan hipotesisnya atau teori, menggunakan data mendalam dan hasil penelitiannya lebih menekankan pada makna dibandingkan *generalisasi*. (Sugiyono, 2013:7-8).

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif karena peneliti ingin mengetahui secara mendalam bagaimana Implementasi Kebijakan Kartu Prakerja di Kabupaten Bandung Barat. Metode analisis deskriptif digunakan agar dapat menggambarkan bagaimana kondisi di lapangan secara akurat dari berbagai fakta yang ditemukan selama proses penelitian, dengan berbagai kegiatan seperti mengumpulkan dan menggambarkan informasi yang kemudian ditafsirkan berdasarkan data dan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertama kali diluncurkan pada 11 April 2020 Kartu Prakerja menggunakan skema semi bansos sebagai bentuk perlindungan sosial dan untuk meningkatkan keterampilan angkatan kerja melalui pelatihan secara online saat pandemi *Covid-19*. Kemudian pemerintah melakukan penyesuaian skema semi bansos menjadi skema normal pada tahun 2023, dengan berfokus pada peningkatan skill dan produktivitas angkatan kerja dalam rangka pelatihan *skilling*, *reskilling*, dan *upskilling* sebagaimana konsep awal Program Kartu Prakerja sebelum pandemi *Covid-19*. Pelatihan dilakukan melalui zoom atau webinar langsung antara penerima kartu prakerja dan pengajar. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Kartu Prakerja di Kabupaten Bandung Barat peneliti menggunakan model implementasi kebijakan George. C Edwards III yang menunjukkan bahwa ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi berjalannya implementasi kebijakan apakah berjalan dengan baik atau tidak, yaitu : Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Adapun hasil penelitian terkait Implementasi Kebijakan Kartu Prakerja di Kabupaten Bandung Barat sebagai berikut.

A. Implementasi Kebijakan Kartu Prakerja di Kabupaten Bandung Barat

Menurut George. C Edward III dalam (Jumroh & Pratama, 2021) implementasi kebijakan adalah aktivitas yang kompleks dengan banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Penelitian mengenai implementasi kebijakan sangat penting untuk Ilmu Politik dan juga kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Edward III yang meliputi empat dimensi, yaitu : Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Teori ini digunakan untuk mengetahui bagaimana proses implementasi kebijakan tersebut berjalan di tingkat daerah khususnya di Kabupaten Bandung Barat sebagai berikut :

a) Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian implementasi kebijakan Kartu Prakerja di Kabupaten Bandung Barat pada dalam komunikasi belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan tidak adanya sinergi antara pemerintah daerah, khususnya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Barat, dengan pihak pusat atau manajemen pelaksana program (PMO). Seluruh informasi terkait tujuan program, persyaratan peserta, prosedur pendaftaran, pelatihan, hingga pencairan insentif sepenuhnya dijalankan dan dikendalikan oleh PMO melalui website resmi kartu prakerja *prakerja.co.id* yang terpusat. Peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Barat dalam penyebaran informasi sangat minim, tidak ada sosialisasi langsung kepada masyarakat maupun pendampingan teknis bagi calon dan peserta penerima manfaat. Selain itu, tidak terdapat tim pelaksana di lapangan yang ditugaskan secara khusus untuk membantu proses pendaftaran atau menjangkau kelompok masyarakat dengan keterbatasan akses teknologi. Kondisi ini mengakibatkan proses komunikasi bersifat satu arah dari pusat ke peserta, tanpa keterlibatan aktif pemerintah daerah sebagai fasilitator komunikasi di tingkat lokal.

b) Sumber Daya

Implementasi kebijakan Kartu Prakerja di Kabupaten Bandung Barat juga menunjukkan keterbatasan. Sumber daya manusia dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Barat tidak tersedia, dengan tidak adanya tim khusus untuk pelaksanaan program Kartu Prakerja . Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Barat tidak menyediakan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan Kartu Prakerja seperti sosialisasi, tim pelaksana, gadget (handphone atau laptop yang mempunyai). Tidak adanya data peserta yang diterima oleh pihak daerah turut menjadi kendala, sebab informasi peserta, pelatihan, hingga insentif sepenuhnya dikelola oleh pusat dan tidak dibagikan ke daerah. Akibatnya, monitoring dan evaluasi di tingkat kabupaten sulit dilakukan secara efektif. Terutama di wilayah pelosok dimana masyarakat disana tidak melek Terhadap teknologi dan rentan menjadi korban perjokian yang akan

merugikan peserta kartu prakerja.

c) Disposisi

Sikap pelaksana di Dinas Tenaga Kerja menunjukkan kurangnya komitmen untuk membantu masyarakat karena ruang geraknya sangat terbatas. Staf di Bidang Pelatihan, Produktivitas, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersikap responsif ketika ada masyarakat yang meminta informasi, namun hanya dapat mengarahkan kepada kanal resmi yang dikelola PMO. Tidak ada kewenangan untuk melakukan bantuan teknis. Semua pelaksanaan Kartu Prakerja sepenuhnya dijalannya oleh pusat.

d) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam implementasi Kartu Prakerja di Kabupaten Bandung Barat bersifat sentralisasi. Seluruh mekanisme program mulai dari pendaftaran, verifikasi peserta, pengawasan pelaksanaan, penentuan lembaga pelatihan, hingga penyaluran insentif dilakukan oleh manajemen Pelaksana (PMO) sebagaimana diatur Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2020. Sedangkan kewenangan bagi Pemerintah daerah khususnya Dinas Tenaga Kerja di Kabupten Bandung Barat.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 36 tahun 2020 pasal 28, Pemerintah daerah berperan memberikan dukungan dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja dalam bentuk sosialisasi, penyediaan data lembaga pelatihan yang berkualitas di daerah dan fasilitas pendaftaran peserta dari pemilihan jenis pelatihan pada Program Kartu Prakerja.

Struktur birokrasi yang bersifat sentralistik menimbulkan celah dalam implementasi, salah satunya adalah terjadinya kasus pelencengan penerima program. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat peserta yang masih berstatus sebagai pelajar aktif namun tetap lolos sebagai penerima Kartu Prakerja, padahal berdasarkan regulasi hal tersebut seharusnya tidak diperbolehkan. Kemudian ketiadaan tim pelaksana atau pendamping dari Disnaker di lapangan semakin memperbesar potensi terjadinya kesalahan sasaran penerima program Kartu Prakerja. Hal ini mengindikasikan bahwa struktur birokrasi yang diterapkan belum adaptif terhadap kebutuhan di daerah.

B. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Kartu Prakerja Di Kabupaten Bandung Barat

Implementasi suatu kebijakan publik tidak lepas dari berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat teknis, struktural, maupun sosial. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara lapangan, ditemukan sejumlah permasalahan yang menghambat optimalisasi Implementasi Kebijakan Kartu Prakerja di Kabupaten Bandung Barat. Hambatan-hambatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Komunikasi

Salah satu hambatan utama yang ditemukan adalah proses komunikasi antar pemangku kebijakan antar Manajemen Pelaksana (PMO) dan Pemerintah Daerah khususnya Dinas Tenaga kerja Kabupaten Bandung Barat tidak berjalan dengan baik. Keadaan ini menyebabkan minimnya peran aktif dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Barat dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja. Dinas setempat cenderung pasif dan hanya menunggu instruksi pusat, jika tidak ada instruksi maka Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten Bandung Barat tidak akan mengambil langkah inisiatif untuk ikut mensukseskan program ini. Tidak adanya keterlibatan dalam proses sosialisasi, pendaftaran, pelatihan, ataupun evaluasi program. Hal ini dikarenakan seluruh sistem pengelolaan program, mulai dari seleksi peserta hingga penyaluran insentif, sepenuhnya dikelola oleh pemerintah pusat melalui platform digital.

Kurangnya peran disnaker dalam aspek komunikasi turut andil dalam munculnya praktik perjokian di Kabupaten Bandung Barat. Kasus perjokian terjadi ketika pihak ketiga menawarkan jasa untuk mendaftarkan akun Kartu Prakerja hingga pengerjaan pelatihan dilakukan oleh penjoki dengan imbalan tertentu, praktik ini biasanya muncul karena banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang kartu prakerja, tidak memahami alur pendaftaran atau kesulitan dalam menggunakan teknologi. Akibatnya, komunikasi yang seharusnya bersifat langsung dan jelas antara pelaksana program dan masyarakat tergantikan oleh perantara yang tidak resmi dan berpotensi merugikan peserta, sehingga tujuan utama dari Kartu Prakerja untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing pekerja menjadi tidak tercapai.

b) Sumber Daya

Pemerintah daerah tidak memperoleh data mengenai siapa saja yang mendaftar dan lolos program, jenis pelatihan yang mereka ikuti, atau bagaimana dampaknya terhadap kompetensi maupun lapangan pekerjaan mereka setelah pelatihan. Hal ini membuat monitoring dan evaluasi di wilayah menjadi tidak mungkin dilakukan. Karena semua data dan pelaksanaan pelatihan terpusat secara digital oleh pemerintah pusat, tidak ada sistem evaluasi atau pelaporan khusus yang dapat diakses atau dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan tidak adanya *feedback loops* yang dibutuhkan untuk perbaikan kualitas pelatihan, pengawasan terhadap keterlibatan peserta, ataupun pemantauan dampak pelatihan terhadap peningkatan keterampilan kerja.

Ketiadaan data lokal ini juga menyulitkan dinas dalam menilai efektivitas program dalam memenuhi kebutuhan daerah, padahal pemetaan data berdasarkan wilayah sangat penting untuk menentukan intervensi atau perbaikan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Program Kartu Prakerja skema normal yang dijalankan secara daring, luring dan *hybrid*. Terutama pelatihan yang dilakukan secara daring keberhasilan pelaksanaannya sangat tergantung pada ketersediaan internet dan perangkat digital seperti laptop, *smartphone*, dan kuota data. Sayangnya, tidak semua masyarakat memiliki akses tersebut, terutama mereka yang tinggal di wilayah dengan infrastruktur yang belum memadai atau berasal dari kelompok berpenghasilan rendah. Ketimpangan dalam hal akses ini menjadi hambatan serius karena menyebabkan ketidaksetaraan partisipasi, di mana hanya masyarakat dengan dukungan perangkat dan jaringan memadai yang dapat memanfaatkan program secara optimal. Dibutuhkan peran dari dinas terkait untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan menyediakan fasilitas sarana prasarana yang memadai.

c) Disposisi

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa sikap pelaksana di tingkat daerah, khususnya dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Barat, belum sepenuhnya mencerminkan dukungan aktif terhadap pelaksanaan program. Dinas Tenaga Kerja di tingkat daerah tidak memiliki tim pelaksana khusus yang bertugas mengelola atau mendampingi implementasi program ini secara langsung di lapangan. Ketidakadaan tim pelaksana khusus di tingkat daerah berdampak pada terbatasnya kapasitas dan peran pemerintah daerah dalam melakukan intervensi cepat apabila ditemukan kendala di masyarakat, seperti kurangnya pemahaman teknis pendaftaran, kesulitan mengakses platform daring, atau kebutuhan penyesuaian materi pelatihan dengan kondisi lokal. Akibatnya, peran Dinas Tenaga Kerja menjadi lebih pasif tanpa adanya berkontribusi signifikan dalam proses penyebaran informasi dan pendampingan peserta

d) Struktur Birokrasi

Struktur pelaksanaan Program Kartu Prakerja bersifat terpusat di mana perencanaan, pengelolaan anggaran, pemilihan peserta, pelaksanaan pelatihan, hingga penyaluran insentif diatur langsung oleh

Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Tenaga Kerja, diketahui bahwa dinas setempat tidak menerima informasi, arahan teknis, maupun penyuluhan langsung dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan program ini. Semua kegiatan sosialisasi, pendaftaran, dan pendampingan peserta sepenuhnya dijalankan oleh manajemen program di tingkat pusat melalui platform daring dan mitra pelatihan yang telah ditunjuk. Akibatnya, pemerintah daerah tidak memiliki peran signifikan dalam proses implementasi.

Tanpa penyuluhan atau koordinasi formal, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Barat tidak berperan aktif dalam menjawab pertanyaan masyarakat, membantu pendaftaran, atau memberikan pendampingan teknis. Hal ini sejalan dengan temuan teori Edwards III, bahwa struktur birokrasi yang kaku dan terlalu terpusat dapat menghambat kelancaran implementasi, mengurangi fleksibilitas pelaksana, dan memperlambat respon terhadap masalah di lapangan. Ketidakadaan data penerima Kartu Prakerja di Disnaker Kabupaten Bandung Barat menimbulkan tidak adanya validasi data peserta, kondisi ini menimbulkan ketidaksesuaian antara aturan yang seharusnya terjadi.

C. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Kebijakan Kartu Prakerja Di Kabupaten Bandung Barat

Dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam Implementasi Kebijakan Kartu Prakerja dibutuhkan kerja sama antara pihak-pihak yang terkait dalam kebijakan ini seperti dari Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja dan Pemerintah Daerah, agar dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat dan terwujudnya tujuan dari kebijakan ini dibuat. Berikut ini adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi :

a) Komunikasi antar pemangku kebijakan

Dalam komunikasi diperlukan strategi penyampaian informasi yang lebih adaptif terhadap kondisi masyarakat. Pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dapat menjalin kerja sama dengan perangkat desa, karang taruna, dan organisasi lokal untuk melakukan sosialisasi secara langsung yang berkelanjutan, khususnya di wilayah yang memiliki keterbatasan akses internet. Sosialisasi melalui media lokal, baliho ataupun selebaran yang berisi tujuan manfaat Kartu Prakerja dan panduan pendaftaran juga perlu digencarkan. Upaya ini tidak hanya bertujuan memperluas jangkauan informasi, tetapi juga sebagai langkah preventif terhadap praktik perijokian. Edukasi langsung mengenai prosedur resmi pendaftaran dan bahaya memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak resmi harus menjadi bagian dari materi sosialisasi.

b) Sumber Daya

Pada aspek sumber daya, pembentukan tim pelaksana yang dibekali dengan pelatihan teknis akan memperluas jangkauan pendampingan kepada masyarakat di Kabupaten Bandung Barat. Di sisi infrastruktur, perlu ada kerja sama dengan penyedia layanan internet untuk memperbaiki akses jaringan di wilayah dengan konektivitas buruk, serta penyediaan posko layanan informasi di kantor desa atau kecamatan yang berfungsi membantu masyarakat mendaftarkan dan mengakses pelatihan daring kartu prakerja. Pelatihan teknis bagi pegawai Dinas Tenaga Kerja juga penting dilakukan agar mereka dapat memberikan penjelasan yang akurat terkait mekanisme program.

c) Disposisi

Untuk hambatan pada aspek disposisi (sikap pelaksana), langkah yang dapat diambil adalah membangun motivasi dan rasa memiliki terhadap program melalui penetapan target kinerja yang jelas dan pemberian penghargaan bagi pelaksana yang aktif serta berhasil meningkatkan partisipasi

masyarakat. Kegiatan penyuluhan yang berfokus membahas tujuan strategis Kartu Prakerja agar dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya peran mereka dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah walaupun kartu prakerja adalah proram pusat.

d) Struktur Birokrasi

Sementara itu, untuk hambatan pada aspek struktur birokrasi, perlu dilakukan penyesuaian agar pemerintah daerah dapat aktif dalam implementasi program kartu prakerja dengan dibentuknya tim pelaksana khusus Kartu Prakerja di tingkat kabupaten dapat menjadi langkah awal, meskipun wewenang utama tetap di pusat. Tim ini berfungsi sebagai penghubung informasi antara manajemen pelaksana pusat dengan masyarakat daerah, sekaligus memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan pendampingan, serta dapat menyederhanakan prosedur administrasi di tingkat daerah dan akan mempercepat penanganan kendala di lapangan. Dengan adanya unit dan mekanisme yang lebih ringkas, diharapkan Dinas Tenaga Kerja dapat memainkan peran strategis dalam menjembatani kepentingan pusat dan kebutuhan lokal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Kartu Prakerja di Kabupaten Bandung Barat yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III yang mencakup empat indikator utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap pelaksana, dan struktur birokrasi dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

a) Implementasi Kebijakan Program Kartu Prakerja di Kabupaten Bandung Barat belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari lemahnya komunikasi antara pembuat kebijakan di tingkat pusat dan Pemerintah Daerah sehingga tidak tersampainya tujuan dari Kebijakan Kartu Prakerja Kepada masyarakat sasaran di tingkat lokal. Sosialisasi program tidak dilakukan secara sistematis oleh Dinas Tenaga Kerja setempat dan sebagian besar masyarakat memperoleh informasi secara mandiri melalui internet, media sosial, bantuan anggota keluarga hingga menggunakan jasa pendaftaran akun Kartu Prakerja. Program Kartu Prakerja dinilai mampu dalam meningkatkan keterampilan kerja dan produktivitas. Namun, untuk implementasinya di Kabupaten Bandung Barat dinilai belum optimal dikarenakan berdasarkan hasil penelitian yang berlandaskan pada 4 dimensi dari teori G. Edwards III yaitu : komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi tidak berjalan dengan semestinya, sehingga diperlukan pembenahan agar ke 4 dimensi diatas dapat berjalan dengan baik dan mampu mendukung untuk mensukseskan Kebijakan Kartu Prakerja di Kabupaten Bandung Barat.

b) Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima manfaat dan pelaksana daerah, ditemukan sejumlah hambatan dalam implementasi Program Kartu Prakerja di Kabupaten Bandung Barat. Pertama, tidak adanya peran aktif Dinas Tenaga Kerja dalam pelaksanaan program menyebabkan rendahnya dukungan lokal. Kedua, tidak tersedia data mengenai jumlah peserta, jenis pelatihan, atau dampak program di wilayah tersebut. Ketiga, rendahnya literasi digital masyarakat menyebabkan ketergantungan pada jasa pihak ketiga atau bantuan orang lain untuk dapat mengakses program. Keempat, akses terhadap perangkat dan internet yang belum merata turut membatasi partisipasi masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Kelima, tidak adanya sistem pemantauan dan evaluasi berbasis daerah mengakibatkan efektivitas program tidak dapat diukur secara lokal.

c) Sinergi yang baik antara pusat dengan pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam implementasi kebijakan kartu prakerja di kabupaten bandung barat. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah akan memiliki wewenang dalam

melaksanakan tugasnya serta harus ada monitoring dari pusat Kepada pemerintah daerah agar terjadi evaluasi yang berkelanjutan dan dapat meningkatkan kualitas dari pelaksanaan Kebijakan Kartu Prakerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang , A., & S.M, R. (2024). *Teknik Wawancara Dalam Metode Penelitian Kualitatif*. Borneo Novelty Publishing.
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama. *buku pengantar administrasi publik*. (n.d.).
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in The Third World*. Princnton University Press.
- Islamy, M. I. (2016). *Definisi dan Makna Kebijakan Publik*. Universitas Terbuka. Malian, S. (2021). *Kebijakan Publik dalam Negara Hukum*. Kreasi Total Media. Mekarisce, A. A. (2020). *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat*. JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat
- MSi, H., Ustiauwaty, J., & Juliana Sukmana, D. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*.
- Ramdhan, M. (2021). (2021). *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara Samodra, W. (1994). *Kebijakan Publik*. Intermedia Jakarta
- Sedarmayanti. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen pegawai negeri Sipil*. PT Refika Aditama.
- Soepeno, B. (2019). *Paradigma, Rancangan dan Proposal Ragampenelitian Kualitatif (Bidang Ilmu-Ilmu Social dan Pendidikan)*. Repository Universitas Jember.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Fadillah, A. (n.d.). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU PRAKERJA PERIODE GELOMBANG PENDAFTARAN TAHUN 2020*. Retrieved April 18, 2025, from <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/63179>
- Hakim, A. (2022). *Pelaksanaan Program Kartu Pra Kerja Untuk Menangulangi Pengangguran di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Desa Sawit Jaya, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur)*.
- Sinaga, R. (2022). *Pengaruh Program Jaminan Sosial Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada Penerima Kartu Prakerja di Kabupaten Banyumas Tahun 2020)*.

- Akib, H. (2010). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 2.
- Andina, E. (2022). Peran Pemerintah Daerah dalam Implementasi Program Kartu Prakerja di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*.
- Ilal, G., Pingkan, I., & Tumangkeng, S. Y. L. (2024). ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM KARTU PRAKERJA DALAM PENURUNAN PENGANGGURAN DI KECAMATAN SONDER KABUPATEN
- MINAHASA. In *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* (Vol. 24, Issue 2).
- Nurhadi, W. (2020). Implementasi Kebijakan Program Kartu Prakerja Di Tengah Pandemi Covid-19. *Journal of Political Science*, May.
- Puspo Priyadi, B., Tritanti Tritanti, & Purnaweni, H. (n.d.). *KINERJA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KARTU PRAKERJA DI TENGAH PANDEMI COVID-19 DI KOTA JAKARTA TIMUR*.
- Rozikin, M., & Oktasari, W. (2023). Efektivitas Program Kartu Prakerja Dalam Menurunkan Pengangguran Di Masa Pandemi Covid-19. *KOLABORATIF: Jurnal Isu Sosial Dan Tinjauan Kebijakan*, 1(1).
- Syahrani, S., & Gunawan, A. (n.d.). *Global : Jurnal Lentera BITEP Efektivitas Program Kartu Prakerja dalam Membangun Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Skill*. <https://lenteranusa.id/>
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja (2022).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia 113 Tahun 2022 Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Prakerja (2022)
- Keputusan Menteri Perekonomian Nomor 251 Tahun 2022 (Insentif SkemaNormal) (2022).
- Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Komite Cipta Kerja 219 Tahun 2020 Tentang Bantuan Pelatihan, Insentif Pelatihan, Dan Insentif Survei Kebekerjaan Bagi Kartu Prakerja (2020).
- Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui

Program Kartu Prakerja

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah

Apriliani, A. (n.d.). *Ini Syarat Lengkap dan Tips Ampuh untuk Lolos Seleksi Prakerja*.

Retrieved from Tokopedia.

BADAN PUSAT STATISTIK. (2022, Mei 9). *Februari 2022: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,83 persen dan Rata-rata upah buruh sebesar 2,89 juta rupiah per bulan*.

Retrieved from BADAN PUSAT STATISTIK:
<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2022/05/09/1915/februari-2022-tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-83-persen-dan-rata-rata-upah-buruh--sebesar-2-89-juta-rupiah-per-bulan.html>

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat. (2024, Desember 11). *Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)*. Retrieved from Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat:

<https://bandungbaratkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjE4IzI=/jumlah-penduduk-miskin-.html>

Hartanto, A. (2023). *Gali potensi dirimu dengan Kartu Prakerja*. Prakerja.

Hartanto, A. (2024, 02 01). *Menko Airlangga Tegaskan Komitmen Pemerintah dalam Pengembangan SDM*. Retrieved from KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA: <https://ekon.go.id/publikasi/detail/154/menko-airlangga-tegaskan-komitmen-pemerintah-dalam-pengembangan-sdm#:~:text=Menko%20Airlangga%20Tegaskan%20Komitmen%20Pemerintah%20dalam%20Pengembangan%20SDM,kualitas%20SDM%20diperlukan%20agar%20bisa%20menaklukkan%2>

Prakerja. (2023). *Tentang Prakerja*. Prakerja. <https://www.prakerja.go.id/tentang-prakerja>

Prakerja, K. (2024). *Prakerja*. Retrieved from Laporan Manajemen Pelaksana Program Prakerja Tahun 2023: <https://laporan-2023.prakerja.go.id/#getEbook>

Prakerja, K. (n.d.). *Statistik Penerima Prakerja 2020 - 2024*. Retrieved from Prakerja: <https://statistik.prakerja.go.id/provinsi/?nama=Jawa%20Barat&kode=32>

Statistik, B. P. (2023). *Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat*. Retrieved from Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka 2023: <https://web-api.bps.go.id/download.php?f=A0xKtmgRrA3MgZPuz8zHby85bmMwMXd6SEtnRIUrcWxIVDFuT25ISkd0bjNiYWZaUnJlAs9NMlPkTzFJeXo2UE1BS1I0R253bVkv2MxQzIKQUVkcW42RlRWd1FRVUI3emhCcVp2blN5Q3VKcFBXNVRqdW1hc2hjRVUyVlZkYrT1pITmUrWIY0R2ZCcXBOTWhzVUZvYjFpWnhoVW9JeG>